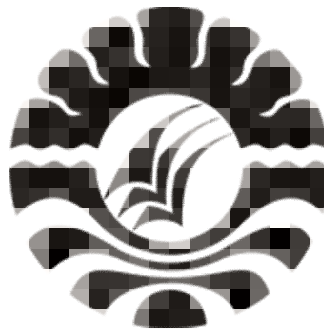


594 / Ilmu Administrasi
(Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, dll)

**USULAN PENELITIAN
STRATEGIS NASIONAL**



**DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP
PENGEMBANGAN KOMPETENSI LOKAL SEBAGAI BASIS
KERJASAMA ANTAR-DAERAH DI PROVINSI SULAWESI
BARAT**

KETUA PENELITIAN

Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si. NIDN 0022056506

ANGGOTA

Dr. Risma Niswati, M.Si NIDN 0026027206
Ismail, S.Pd., M.Si. NIDN 0009097907

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
APRIL 2015**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL

Judul Kegiatan

: DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP
PENGEMBANGAN KOMPETENSI LOKAL SEBAGAI BASIS KERJASAMA
ANTAR-DAERAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Tema Isu Strategis Nasional

: Otonomi daerah dan desentralisasi (Regional autonomy & decentralization)

Kode>Nama Rumpun Ilmu

: 594 / Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll)

Ketua Peneliti

A. Nama Lengkap

: Prof. DR HAEDAR AKIB M.Si

B. NIDN

: 0022056506

C. Jabatan Fungsional

: Guru Besar

D. Program Studi

: Ilmu Administrasi Publik

E. Nomor HP

: 08128023594

F. Surel (e-mail)

: haedar652002@yahoo.com.au

Anggota Peneliti (1)

A. Nama Lengkap

: RISMA NISWATY S.S., M.Si

B. NIDN

: 0026027206

C. Perguruan Tinggi

: Universitas Negeri Makassar

Anggota Peneliti (2)

A. Nama Lengkap

: ISMAIL M.Si.

B. NIDN

: 0009097907

C. Perguruan Tinggi

: Universitas Negeri Makassar

Institusi Mitra

A. Nama Institusi Mitra

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Polewali Mandar

B. Alamat

: Jl. Manunggal No. 11 Telp 0428-21120, Fax 0428-22422 Polewali 91313

C. Penanggung Jawab

: Agusnia Hasan Sulur, SP.M.Si.

Lama Penelitian Keseluruhan

: 3 Tahun

Penelitian Tahun ke

: 1

Biaya Penelitian Keseluruhan

: Rp 300.000.000,00

Biaya Tahun Berjalan

: - diusulkan ke DIKT1

Rp 100.000.000,00

- dana internal PT

Rp 0,00

- dana institusi lain

Rp 0,00

- inkind sebutkan



(Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum.)

NIP/NIK 196712311993031016

Makassar, 27 - 4 - 2015,

Ketua Peneliti,

(Prof. DR HAEDAR AKIB M.Si)

NIP/NIK196505221990031002



Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian UNM

(Prof. Dr. H. M. Jufri, M.Pd.)

NIP/NIK 195912311985031016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Urgensi (keutamaan) Penelitian	3
1.5 Luaran Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB 3. METODE PENELITIAN	12
3.1 Metode Penelitian	12
3.2 Jenis dan Sumber Data	13
3.3 Teknik Pengumpulan Data	14
3.4 Teknik Analisis Data	16
3.5 Aplikasi dan Kebutuhan Data	18
BAB 4. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	23
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN-LAMPIRAN	28
Lampiran 1 Justifikasi Anggaran Penelitian	29
Lampiran 2 Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas	30
Lampiran 3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penelitian	31
Lampiran 4 Biodata Ketua dan Anggota Peneliti	32
Lampiran 5 Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana	53

PROPOSAL HIBAH KOMPETENSI

DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PENGEMBANGAN KOMPETENSI LOKAL SEBAGAI BASIS KERJASAMA ANTAR-DAERAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT

I. RINGKASAN

Kajian menganalisis dampak (manfaat) kebijakan pemekaran wilayah terhadap pengembangan kompetensi lokal sebagai basis kerjasama antar daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat masih memperlihatkan. Pertama, nilai PDRB Provinsi Sulawesi Barat berada pada urutan kelima dari lima provinsi di Sulawesi. Kedua, kabupaten di Provinsi ini giat menata diri dengan cara mengembangkan komoditi unggulan daerahnya, khususnya yang mendukung pengembangan **Empat Strong Points** – infrastruktur, sektor pendidikan, sektor kesehatan, gerakan nasional kakao (Laporan EKPD UNM dan Bappenas, 2009, 2010, 2011), atau saat ini **Lima Isu Strategis** dalam rencana pembangunan Provinsi Sulawesi Barat (Laporan EKPD UNM dan Bappenas, 2013). Analisis dampak kebijakan ini menggunakan jenis penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif, dengan pendekatan survei evaluatif dan deskriptif analisis. Unit analisis penelitian ini adalah *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) dan beragam potensi dan kompetensi lokal pada setiap instansi (Satuan Kerja Pembangunan Daerah, SKPD) pemerintah daerah dan di masyarakat. Pengumpulan datanya dilakukan melalui teknik observasi (lembar observasi/ checklist), angket (daftar pertanyaan terstruktur), wawancara (pedoman interviu), diskusi kelompok terfokus (panduan diskusi), dan dokumentasi. Teknik analisis dampak kebijakan yang digunakan adalah analisis “*shift-share*” berserta teknik analisis pendukungnya yaitu pengukuran nilai *Localization Quotient (LQ)*, *Localization Index (LI)*, *Specialization Index (SI)*; analisis “*multiplier-effects*”, dan **deskriptif analisis**. Analisis dampak kebijakan, sebagai bagian dari teknik evaluasi kebijakan (Finsterbusch dan Motz, 1980, yang dikutip oleh Wibawa dkk., 1994) menggunakan pendekatan “*comparative before-after*”. Penggunaan teknik ini dipilih karena dianggap paling kuat hasil simpulan yang dihasilkan. Hasil yang diharapkan yaitu: 1) Pemetaan karakteristik (kuantitas, kualitas, keberagaman, dan penyebaran) potensi dan kompetensi – SDA, SDM, kelembagaan, budaya – lokal pada setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat sebagai basis pengembangan kerjasama antar-daerah; 2) Pola-pola dan bentuk kerjasama intra dan antar daerah berbasis kompetensi lokal yang dikembangkan oleh setiap daerah di Provinsi Sulawesi Barat; 3) prinsip-prinsip generik sebagai acuan pelaksanaan kerjasama antar daerah yang efisien, efektif, sinergis, dan berkelanjutan; 4) dokumen *best practices* orientasi nilai kebijakan (peraturan) yang jelas sebagai landasan normatif kerjasama antar daerah; dan (5) pemetaan pemangku kepentingan dan institusi lokal yang terlibat dalam kerjasama antar-daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

Key words: Pemekaran Wilayah, Kompetensi Lokal, Kerjasama antar daerah

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dampak kebijakan pemekaran wilayah menurut Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, beserta undang-undang dan peraturan lainnya yang mendukung pemekaran wilayah mendorong terjadinya *euphoria* pembentukan daerah otonom baru (DOB) atau **pemekaran wilayah** sehingga berdampak pada stagnasi (perlambatan) pembangunan daerah di Indonesia. Dalam praktik, banyak daerah yang mengabaikan kriteria sebagaimana diatur dalam UU dan PP tersebut, bahkan sebaliknya mendahulukan baik fakta sejarah dan kelompok kesukuan maupun kepentingan perorangan (kursi bupati, kepala dinas, dll). Pada akhirnya, dampak kebijakan pemekaran wilayah ini selalu menimbulkan pro dan kontra. Meskipun penyelesaiannya diserahkan kepada daerah, namun seringkali penyelesaian persoalan yang dihadapi tetap berlarut-larut sehingga berpotensi melahirkan konflik kepentingan yang berkepanjangan di daerah yang dimekarkan dengan daerah induknya, seperti halnya yang terjadi hingga saat ini di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat (Hasil Penelitian Pendahuluan di Provinsi Sulawesi Barat, 2012, 2013) yang gemanya berlanjut hingga saat ini (Wawancara: Dr. Said Saggaf, M.Si., mantan Bupati Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, 2014).

Berbagai macam permasalahan dan dampak kebijakan pemekaran wilayah ini dapat terlihat dalam laporan hasil penelitian sebagai berikut: 1) penataan kelembagaan DOB belum sepenuhnya mengacu pada kondisi aktual wilayah dan pada pertimbangan efisiensi, keterbatasan sarana dan prasarana dialami hampir semua DOB; selanjutnya DOB belum banyak melakukan terobosan atau inovasi yang bernilai untuk mensiasati kelangkaan sumber daya guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2) nilai rasio jumlah pegawai dengan penduduk pada DOB masih lebih rendah dibandingkan rasio nasional

dan rasio ideal (jumlah PNS Golongan I-IV dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000; 3) kegiatan investasi di DOB belum menunjukkan perkembangan dan masih terjadi konflik perebutan aset antara daerah induk dengan DOB, seperti yang terjadi hingga saat ini di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat; 4) untuk DOB yang semula berstatus kota administratif masyarakatnya menilai tidak ada perubahan kualitas layanan sebelum dan setelah menjadi daerah otonom, sedangkan untuk DOB yang semula berstatus kecamatan, masyarakat menilai ada perubahan yang signifikan. 5) Hubungan eksternal DOB diliputi permasalahan transfer aset (Laporan EKPD Provinsi Sulawesi Barat oleh Bappenas, 2013; Studi Pendahuluan Tim Peneliti di Provinsi Sulawesi Barat, 2013; Bappenas, 2004; Kadjatmiko, 2005; STIALAN, 1999). Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis dampak (manfaat) kebijakan pemekaran wilayah terhadap pengembangan kompetensi lokal sebagai basis kerjasama antar-daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana karakteristik (kuantitas, kualitas, keberagaman, dan penyebaran) kompetensi lokal pada setiap kabupaten sebagai basis pengembangan kerjasama antar daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Pola-pola dan bentuk kerjasama antar daerah seperti apa yang eksisting dikembangkan berbasis kompetensi lokal pada setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
- c. Bagaimana gambaran prinsip-prinsip generik sebagai acuan pelaksanaan kerjasama antar daerah yang efisien, efektif, sinergis, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat.
- d. Mengapa dokumen *best practices* orientasi nilai kebijakan (peraturan) yang jelas diperlukan sebagai landasan normatif kerjasama antar daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

- e. Bagaimana gambaran pemetaan pemangku kepentingan dan institusi lokal yang terlibat dalam pengembangan model kerjasama antar-daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud menganalisis dampak kebijakan pemekaran wilayah terhadap pengembangan kompetensi lokal sebagai basis kerjasama antar daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu, dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan karakteristik (kuantitas, kualitas, keberagaman, dan penyebaran) kompetensi lokal pada setiap kabupaten sebagai basis pengembangan kerjasama antar daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan pola-pola dan bentuk kerjasama antar daerah yang eksisting dikembangkan berbasis kompetensi lokal pada setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
- c. Mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan prinsip-prinsip generik sebagai acuan pelaksanaan kerjasama antar daerah yang efisien, efektif, sinergis, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat.
- d. Mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan dokumen *best practices* orientasi nilai kebijakan (peraturan) yang jelas diperlukan sebagai landasan normatif kerjasama antar daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
- e. Mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan gambaran pemetaan pemangku kepentingan dan institusi lokal yang terlibat dalam pengembangan model kerjasama antar-daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah kabupaten/kota di Indonesia menjalankan fungsi dan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta penyediaan pelayanan publik (Haedar,

2012). Dalam usaha dalam undang-undang yang mengakomodasi kepentingan masyarakat melalui dampak kebijakan mengenai kerjasama yang lebih luas dengan tujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan intra dan antar daerah yang seimbang, selaras, dan serasi dalam melakukan efisiensi. Oleh karena itu, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan (induk) diharapkan dapat mempersiapkan diri secara optimal agar tujuan yang akan dicapai dalam rencana strategisnya untuk menyediakan kompetensi setiap daerah.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, setiap daerah menghadapi masalah dan tantangan akibat “keterbatasan” atau “kekhasan” potensi sumber daya yang dimiliki, namun sekaligus memiliki kekuatan dan peluang untuk melakukan kerjasama antar daerah, khususnya daerah kabupaten/kota yang berdekatan dan berada dalam satu kawasan di suatu provinsi (Akib, 2012). Provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah yang memiliki potensial dalam pengembangan kerjasama antar daerah, karena didukung oleh berkembangnya berbagai sektor pembangunan sebagai basis pengembangan setiap daerah.

Urgensi dan signifikansi melakukan penelitian tentang **Dampak Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Pengembangan Kompetensi Lokal Sebagai Basis Kerjasama Antar-Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat** didasarkan pada kenyataan dan hasil pengamatan bahwa kerjasama intra dan antar daerah di Provinsi Sulawesi Barat belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil Penelitian Strategis Nasional Akib dkk (2009) dan hasil penelitian Akib dkk di Bappenas (2006) menyimpulkan bahwa pemetaan kompetensi lokal sebagai basis pengembangan model kerjasama dan koordinasi antar daerah di kawasan Ajatappareng Provinsi Sulawesi Selatan dan di Indonesia hanya mampu memberikan pedoman bagi setiap daerah dalam menetapkan komoditas unggulan yang akan dikembangkan, padahal yang diharapkan adalah bagaimana pengembangan model kerjasama dan koordinasi tersebut mampu memberikan kemanfaatan bagi warga masyarakat secara

optimal dan berkesinambungan, melalui penyediaan pelayanan publik dasar secara efisien, efektif, dan berkualitas.

Tujuan penelitian ini sesuai dengan arah strategi dan kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Tri Konsepsi Pembangunan (1990) dan Rencana Strategis pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota di kawasan Mamminasata saat ini (2011). Namun demikian, dalam implementasi programnya belum sampai kepada bagaimana upaya nyata setiap daerah yang tergabung di dalamnya untuk memikirkan pengembangan model kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik secara efisien, efektif, dan berkualitas, sebagaimana yang diharapkan oleh Rosen (1993) yang dikutip Ichwanuddin (2005). Di samping itu, belum jelas format atau model kerjasama intra dan antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dasar (bidang kesehatan, pendidikan, dan transportasi), seperti pembangunan rumah sakit (bidang kesehatan) di perbatasan dua kabupaten di Provinsi Gorontalo (Tarigan, 2007).

Belum adanya model kerjasama antar daerah yang dikembangkan ini diindikasikan oleh beberapa persoalan, di antaranya adalah terdapat perbedaan kepentingan dan prioritas antara satu daerah dengan daerah lainnya serta kurangnya dukungan dokumen-dokumen legal sebagai payung kerjasama yang dapat menjadi acuan pelaksanaan kerjasama. Di samping itu, peran pemerintah pusat dirasakan masih dominan. Untuk itu, perlu adanya kreativitas dan inovasi dalam mereaktualisasi dan mengadaptasi konsep pelayanan publik dasar yang dilaksanakan melalui pengembangan model kerjasama antar daerah dengan prinsip efisiensi dan efektifitas, kualitas, sinergitas, dan saling menguntungkan dalam bidang yang terkait dengan kepentingan lintas wilayah. Selain itu, diperlukan sebuah strategi kebijakan pengembangan model kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik berbasis kompetensi lokal sebagai keunggulan setiap daerah.

1.5 Luaran Penelitian

Selama tiga tahun rencana pelaksanaan kegiatan ini akan dihasilkan luaran tahunan sebagai berikut:

Tahun	Luaran	Spesifikasi
I	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pemetaan karakteristik kompetensi lokal setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Pola-pola dan bentuk atau model kerjasama antar daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Peta potensi dan kompetensi Sumber Daya Alam/SDA yang meliputi kekayaan alam di darat, di laut/ dibawah laut dan di udara (istilah yang digunakan di Sulawesi Barat untuk menyatakan minyak juga ada di udara, minyak kelapa) Peta potensi dan kompetensi Sumber Daya manusia/SDM yang meliputi karakteristik penduduk (usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan/ mata pencaharian), penyebarannya pada wilayah di pantai, daratan dan pegunungan, dan sebagainya. Peta potensi dan kompetensi kelembagaan yang meliputi organisasi dan kelembangan formal dan non-formal yang ada dan berkembang di Provinsi Sulawesi Barat, baik kelembagaan yang diinisiasi oleh pemerintah maupun yang tumbuh dan dikembangkan oleh kelompok masyarakat setempat. Peta potensi dan kompetensi budaya yang tumbuh, berkembang dan dipertahankan di Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi adat istiadat, kebiasaan, norma-norma yang mengarahkan perilaku warga, serta khazanah budaya yang selama ini dikembangkan, baik yang bernilai ekonomis maupun untuk kepentingan kelanggengannya. Pola kemitraan aktor (P-5 – <i>public, private, people, pers, partnership</i>) dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki Provinsi Sulawesi Barat. Model teoritik kerjasama antar-daerah adalah, antara lain <i>Intergovernmental Service Contract, Joint Service Agreement, Intergovernmental Service Transfer</i> (Henry, 2005), sedangkan model kerjasama yang eksisting selama ini adalah kersama pemasaran, kerjasama transportasi dan penumpang, Kerjasama pengelolaan atas suatu wilayah yang memiliki peran dan fungsi strategis bagi wilayah-wilayah terkait, kerjasama permodalan, kerjasama pemasokan barang

		/ produk dari satu daerah ke daerah lainnya, kerjasama pengaturan mengenai aspek tertentu yang sama-sama dimiliki oleh beberapa kabupaten/kota (Akib dkk, Laporan Penelitian Strategis Nasional, 2009).
II	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prinsip-prinsip generik kerjasama antar daerah yang efisien, efektif, sinergis, dan berkelanjutan. ➤ Dokumen <i>best practices</i> orientasi nilai kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prinsip Generik sebagai acuan kerjasama yang ada secara konseptual adalah antara lain transparansi, akuntabilitas, partisipatif, keefisienan, keefektifan, konsensus, saling menguntungkan dan saling memajukan. ➤ Prinsip khusus kerjasama antar pemerintah daerah yang lainnya adalah dibangun untuk kepentingan umum dan kepentingan yang lebih luas, didasarkan atas saling membutuhkan, saling memperkuat pihak yang terlibat, ada keterikatan masing-masing pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati, tertib dalam pelaksanaan, tidak boleh bersifat politis dan bernuansa KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme), dibangun di atas rasa saling percaya, saling menghargai, saling memahami dan manfaat yang dapat diambil kedua belah pihak. ➤ Landasan normatif kerjasama antar daerah untuk digunakan baik sebagai dasar reformulasi kebijakan/peraturan daerah ➤ Patok duga (<i>benchmarking</i>) pencapaian hasil kerja terukur bagi unit kerja yang dibina untuk meraih citra pelayanan publik di masa akan datang.
III	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hasil pemetaan pemangku kepentingan dan institusi lokal yang terlibat dalam kerjasama antar-daerah sebagai dasar untuk menyusun strategi yang sesuai bagi peningkatan keunggulan daya saing daerah berbasis kompetensi lokal yang dimiliki di Provinsi Sulawesi Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Model kemitraan yang eksisting di lokasi penelitian yang melibatkan peran (role) pihak publik/pemerintah, private (organisasi bisnis), people (warga masyarakat atau penduduk setempat), dan pers (media), perguruan tinggi (PT). ➤ Faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan setiap aktor dalam kerjasama yang bersifat kemitraan yang kolaboratif. ➤ Strategi yang sesuai (fit) untuk memacu kerjasama antar-daerah di Provinsi Sulawesi Barat. ➤ Pemetaan keunggulan daya saing setiap daerah berbasis kompetensi lokal yang dimiliki. ➤ Strategi yang sesuai (fit) untuk pengembangan kompetensi lokal setiap daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dampak Kebijakan

Menurut Dye (1981: 367) dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Dye dan Anderson (1984: 134) menambahkan bahwa semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan baik langsung maupun yang akan datang harus diukur dalam bentuk efek simbolik atau efek nyata yang ditimbulkan. Dari hal tersebut, maka muncullah sebuah output yang akan diperoleh dalam bentuk program yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti rehabilitasi jalan, pembayaran tunjangan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan lainnya yang diharapkan mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Dye (1981: 366) dan Anderson (1984: 136-139) mengungkapkan bahwa sejumlah dampak kebijakan perlu memperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni: 1) dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target, 2) dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target, 3) dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa depan, 4) biaya langsung kebijakan dalam bentuk sumber daya dan dana (uang) yang telah digunakan dalam program, 5) biaya tidak langsung kebijakan yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lain, dan 6) sulit mengukur manfaat tidak langsung dari kebijakan terhadap komunitas yang dituju oleh suatu program kebijakan.

Oleh karena itu, menurut Akib (2009: 7) mengatakan bahwa secara teori dampak kebijakan tidak sama dengan *output* kebijakan. Dye (1981:368) menjelaskan bahwa penting untuk mengukur manfaat dalam bentuk aktivitas pemerintah swasta. Hal ini perlu dicermati karena seringkali terlihat adalah pengukuran aktivitas pemerintah mengukur output kebijakan. Dalam menjelaskan

determinan kebijakan publik, ukuran output kebijakan publik sangat penting diperhatikan. Namun, dalam menilai dampak kebijakan publik, perlu ditemukan identitas perubahan dalam lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah tersebut. (Akib, 2009: 7)

2.2 Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah merupakan salah satu kebijakan otonomi daerah yang diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*). Melalui kebijakan ini diharapkan akan mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat (Dwiyanto, 2006a: 87). Sedangkan menurut Peter (2012) Pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

Sebagaimana ungkapan Ratnawati (2009: 13-14) mengatakan bahwa maraknya pemekaran wilayah memberikan ruang inspirasi, keberagaman serta otonomi lokal, sesuatu yang diabaikan di era orde baru yang patut untuk disyukuri. Dengan pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru merupakan kebijakan paling menonjol dalam melakukan penataan daerah (*territorial reform*). Dimana kebijakan penataan daerah mencakup pemekaran wilayah otonomi, penghapusan daerah dan penggabungan daerah otonom. Pemekaran merupakan pemecahan satu daerah otonom ke dalam beberapa daerah otonom. Sedangkan penggabungan daerah otonom adalah dua atau lebih daerah otonom yang menggabungkan diri ke dalam satu daerah otonom (Pratikno dan Burhan, 2011:131).

Secara khusus, UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang pembentukan daerah pada Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dianalogikan bahwa masalah pemekaran wilayah merupakan ruang lingkup

pembentukan daerah. Sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bawah “undang-undang pembentukan daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen serta perangkat daerah”.

2.3 Kerjasama Antar Daerah

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan terdapat berbagai bentuk kerjasama antar sektoral dan kerjasama antar daerah di Indonesia. Dua bentuk kerjasama antar sektor di daerah tertentu dapat disajikan sebagai berikut (Bappenas, 2005, Bappenas, 2006). Pertama, kerjasama Merapi. Pada kerjasama ini berbagai sektor dalam pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berbagi tugas untuk merealisasikan tujuan pemerintahan daerah dalam mengelola Kawasan Merapi menjadi kawasan wisata alam. Berbagai sektor pemerintahan yang terkait bekerjasama mengurus penetapan status hukum Taman Nasional dan membuat perencanaan tentang pengelolaan dan penataan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (KTNGM). Kedua, kerjasama dalam Forum Kemitraan Pembangunan Ekonomi Bali (FKPEB) diprakarsai pemerintah Daerah Provinsi Bali. Forum ini terdiri dari berbagai *stakeholder*, institusi pemerintah yang terkait dengan upaya pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan produksi dan pemasaran serta pendanaan swasta dan masyarakat. FKPEB berperan sebagai fasilitator kelompok produsen yang berfungsi mempengaruhi eksekutif dan legislatif agar menghasilkan kebijakan publik yang berpihak pada pengembangan ekonomi lokal. FKPEB juga mampu memfasilitasi peningkatan kualitas dan mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan para produsen sehingga produknya dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.

Bentuk kerjasama yang lain adalah kerjasama antar daerah yang dapat melibatkan suatu sektor, misalnya hanya pemerintah saja, khususnya pemerintah daerah atau melibatkan stakeholder non-pemerintah – pihak swasta, perusahaan, dan masyarakat (Bappenas, 2005: Bappenas, 2006). Pertama, kerjasama antar pemerintah daerah dalam pengembangan Kawasan Pawonsari yang melibatkan pemda dari tiga kabupaten dan dari tiga provinsi berbeda, yaitu kabupaten Pacitan (Jawa Timur), Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) dan kabupaten Wonosari (Daerah Istimewa Yogyakarta). Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan tersebut, dengan menggali dan memanfaatkan potensi wilayah, khususnya sektor strategis. Salah satu rencana besarnya adalah mengelola dan mengembangkan kawasan pantai Pawonsari, selain beberapa rencana pembangunan infrastruktur penunjang jalan.

Kedua, kerjasama Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang terfokus pada “Distribusi pajak hotel dan restoran (PHR) Kabupaten Badung dan kota Denpasar kepada kabupaten-kabupaten di Provinsi Bali”. Kabupaten Badung dan kota Denpasar dinilai oleh kabupaten lain di Provinsi Bali telah memperoleh eksternalitas positif dari wilayah sekitarnya. Hal itu terjadi karena para wisatawan yang datang untuk menikmati beragam kekayaan alam dan budaya di berbagai kabupaten di Bali umumnya membelanjakan dananya di kabupaten Badung dan kota Denpasar yang memiliki fasilitas hotel dan restoran yang memadai.

Ketiga, pengelolaan program transmigrasi di Kalimantan Timur. Pola kerjasama antar daerah ini tidak direncanakan secara khusus karena awalnya transmigrasi merupakan program nasional, sementara daerah hanya membantu pelaksanaannya. Setelah otonomi daerah dilaksanakan, kerjasama antara daerah penerima dan pengirim transmigran secara bertahap dirancang dan diperbaiki, sehingga diperoleh format yang lebih baik dan saling menguntungkan. Kerjasama antara pemerintah daerah penerima transmigran (Kalimantan Timur) dengan pemerintah daerah pengirim transmigran (seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali) antara lain berbentuk kesepakatan, seperti kesepakatan jumlah transmigran serta

berbagai peran dan tanggung jawab kedua pihak. Pemda penerima mengajukan syarat kompetensi transmigran, sedangkan pemerintah daerah pengirim mencari dan melatih calon transmigran agar sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan di daerah tujuan. Pemerintah daerah pengirim dan penerima saling melakukan kunjungan, menjalin komunikasi dengan transmigran dari wilayahnya, memberikan alat musik dan lain sebagainya.

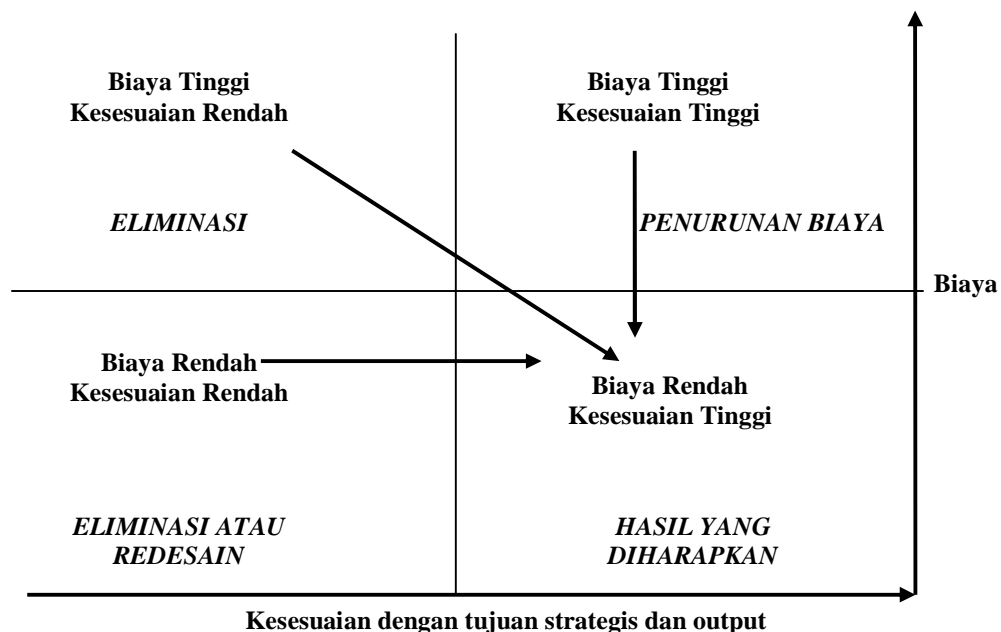
BAB 3

METODE PENELITIAN/PENDEKATAN TEORITIK

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan survai evaluatif guna menganalisis dan menjelaskan berbagai aspek dari dampak kebijakan pemekaran wilayah terhadap pengembangan kompetensi lokal sebagai basis kerjasama antar-daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Melalui pendekatan ini akan dilakukan: 1) eksplorasi konsep, teori, hasil penelitian, dan data yang relevan dan mutakhir; 2) penelusuran dan inventarisasi berbagai isu-isu dan dokumen kerjasama daerah, 3) pendalaman kasus, bentuk atau model kerjasama antar daerah, dan 4) analisis repospektif faktor-faktor determinan pengembangan model kerjasama antar daerah berbasis kompetensi lokal yang dimiliki oleh setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Prinsip dasar metode kerjasama antar daerah ini dipetakan ke dalam matriks kesesuaian antara tujuan strategis yang akan dicapai dengan output yang dihasilkan, sebagaimana terlihat dalam matriks berikut:



3.2 Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer**, yaitu data dan informasi faktual yang diperoleh secara langsung dari lapangan, baik melalui individu maupun wakil dari pemerintah daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), wakil dari institusi lokal di masyarakat yang mengetahui keberagaman potensi dan kompetensi lokal yang dimiliki setiap daerah, baik pada tingkat kabupaten maupun Provinsi Sulawesi Barat. Data primer yang dibutuhkan juga mencakup pula hasil pengamatan fakta dan informasi yang teramati menyangkut jawaban tujuan penelitian.
- b. Data Sekunder**, yaitu data kuantitatif dan informasi faktual yang diperoleh dari dokumen yang tersedia pada institusi pemerintah daerah dan SKPD terkait serta dari institusi lokal di masyarakat. Data sekunder bersifat kuantitatif meliputi semua indikator *Product Domestik Regional Bruto* (PDRB), serta data sekunder lain yang diperoleh melalui publikasi atau laporan penelitian dari dinas/instansi, dan sumber-sumber lain yang mendukung kelengkapan data hasil penelitian.

Secara lengkap, pengelompokan jenis dan sumber data penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Jenis dan Sumber Data yang Diperlukan

Jenis Data		Sumber Data
Data Primer		
1	Data dan informasi mengenai potensi dan kompetensi (alam, SDM, kelembagaan) lokal sebagai basis kerjasama antar daerah pada tingkat kabupaten dan Provinsi Sulawesi Barat.	Data langsung dari lapangan melalui hasil pengamatan, indentifikasi, dan pencataan data dan informasi dari wakil institusi dan individu.
2	Data mengenai lima sektor unggulan Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi	Data Langsung dari lokasi peneltian melalui dukungan instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten dan Provinsi Sulawesi Barat; Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD); Biro Pusat Statistik (BPS); dan dari institusi dan individu yang terpercaya;

3	Data mengenai mekanisme kerjasama antar daerah yang telah, sedang atau akan dikerjakan.	Ibid.
4	Informasi mengenai persepsi para pemangku kepentingan terhadap kerjasama antar daerah/kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.	Data Langsung di lapangan melalui wawancara dan kuesioner dengan aparat SKPD dan pengguna
Data Sekunder		
1	Statistik Ekonomi-Kuangan Daerah Provinsi/Kabupaten se-Sulawesi Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Kajian Provinsi/Kabupaten ▪ Profil Daerah ▪ PDRB kabupaten ▪ Hasil Penelitian
2	Indikator Ekonomi Provinsi/Kabupaten	Bappeda dan BPS setempat
3	<i>Product Domestic Regional Bruto (PDRB)</i> Provinsi/Kabupaten	Bappeda setempat
4	Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Provinsi/Kabupaten	Bappeda setempat
5	Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Media Informasi ▪ Bappeda setempat
6	Data Administrasi dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappeda

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan sekunder penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik berikut:

- a. Teknik Observasi, digunakan dengan cara melakukan pengamatan, identifikasi dan pencatatan ketepatan (kualitas, kuantitas) dan kesesuaian data kuantitatif mengenai semua item dalam *Product Domestic Regional Bruto (PDRB)* tingkat kabupaten dan provinsi pada instansi yang menangani, termasuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Sulawesi Barat. Teknik ini juga digunakan untuk mengumpulkan data potensi dan arah pembangunan daerah, terutama yang terkait dengan potensi dan kompetensi setiap daerah sebagai basis kerjasama antar-daerah. Melalui teknik observasi ini dapat diperoleh hasil konfirmasi data dan informasi mengenai:

- Kondisi dan arah pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat;

- Peta sumberdaya (alam, manusia, kelembagaan) yang dimiliki oleh setiap daerah sebagai basis kerjasama antar daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Teknik Angket, digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam bentuk pernyataan dan pertanyaan tertulis yang disampaikan kepada informan (subyek penelitian). Data yang dikumpulkan melalui teknik angket ini merupakan data subjek yang menyatakan opini, sikap, pengalaman atau karakteristik subjek penelitian secara individu atau kelompok. Selain itu, ditanyakan aspek-aspek penting yang terkait dengan potensi lokal setiap daerah sebagai basis kerjasama antar-daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Melalui pendekatan survai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dapat diperoleh informasi mengenai:
- Karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang berkembang di daerah setempat, terutama menyangkut potensi dan kompetensi lokal yang layak dikembangkan sebagai sumber keunggulan daya saing, atau minimal sebagai penciri setiap daerah;
 - Persepsi stakeholders terhadap potensi dan kompetensi lokal sebagai basis pengembangan kerjasama antar-daerah;
 - Tingkat partisipasi masyarakat (publik) dalam perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat Provinsi Sulawesi Barat.
- c. Teknik Wawancara, digunakan untuk memperoleh informasi faktual dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan kompetensi lokal sebagai basis kerjasama antar daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap sejumlah informan kunci dan informan pada umumnya hingga diperoleh data yang lengkap untuk dianalisis dan diinterpretasikan.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan literatur dari berbagai sumber yang sah, yaitu dengan cara menyusun dan mengkompilasi berbagai data dan laporan yang terkait dengan semua item PDRB dan bentuk-bentuk kerjasama antar daerah di Provinsi

Sulawesi Barat. Selain data sekunder terkait dengan pengembangan model kerjasama atau kesepakatan antar daerah yang telah dibuat, maka melalui pengumpulan data sekunder ini juga diharapkan diperoleh data mengenai:

- Pembagian peran para *stakeholders* secara lebih detail terkait bentuk-bentuk kerjasama antar-daerah yang telah, sedang, atau akan dilakukan;
 - Sarana prasarana publik yang tersedia/dimiliki;
 - Pasar dan kelembagaan sosial ekonomi yang digunakan;
 - Identifikasi isu-isu sosial ekonomi dan budaya yang tumbuh/berkembang di masyarakat; dan
 - Berbagai kebijakan, program, dan atau kegiatan yang sedang berjalan yang semuanya menjadi bukti nyata keterlaksanaan indikator PDRB dan rencana pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
- d. Teknik Diskusi Kelompok Terfokus (*Focused Group Discussion*, disingkat FGD). Melalui teknik ini akan dikembangkan panduan diskusi yang memuat tema penting yang didiskusikan terkait dengan fokus (variabel, indikator) penelitian. Teknik ini akan dilaksanakan secara kontekstual bersama sumber data yang terpercaya, baik mewakili unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kalangan swasta yang berkontribusi dalam pengembangan usaha, dan kalangan media setempat, maupun dari unsur yang mewakili elemen tokoh masyarakat.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan *shift share analysis*. Teknik analisis ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu analisis deskriptif (kualitatif), dan analisis *Shift Share*. Analisis deskriptif dilakukan dengan penggambaran secara komprehensif data kualitatif yang diperoleh melalui hasil penelusuran data lapangan, survai, dan dokumentasi. Hasil analisis ini menjadi masukan yang sangat berharga untuk para pengambil keputusan, tergantung pada bentuk analisis tersebut. Dengan demikian,

analisis deskriptif ini merupakan alat analisis penting untuk mencapai tujuan penelitian.

Pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis perbandingan, yaitu melihat kompetensi lokal berdasarkan sektor basis. Sektor basis didefinisikan sebagai suatu sektor atau kegiatan yang keberadaannya cenderung memusat di suatu wilayah dibandingkan secara relatif dengan keberadaan sektor tersebut di wilayah lainnya. Pemusatan ini menjadikan sektor yang bersangkutan memiliki keunggulan yang bersifat komparatif. Sektor basis juga dianggap sebagai sektor yang memiliki kemampuan untuk mengeksport hasil produksinya, baik dalam bentuk barang maupun jasa secara kompetitif. Pengertian di atas menjadikan suatu sektor basis dapat dianggap sebagai sektor unggulan yang merupakan kompetensi lokal yang dimiliki suatu daerah (Akib, 2010).

Salah satu metode analisis untuk mengidentifikasi sektor basis di antaranya adalah dengan menggunakan teknik analisis *Location Quotient*, disingkat LQ. Ada tiga jenis analisis dalam konteks analisis *Location Quotient*, yaitu:

➤ Pengukuran nilai *Localization Quotient (LQ)*

Nilai LQ digunakan untuk melihat arah kecenderungan suatu item kegiatan apakah terkonsentrasi di suatu daerah (kabupaten) dibandingkan dengan di kabupaten lain. Jika suatu item aktivitas teridentifikasi terkonsentrasi di suatu daerah atau wilayah, maka aktivitas tersebut merupakan sektor basis di daerah tersebut. Formula matematis pengukuran nilai LQ adalah:

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij} / X_i}{X_j / X_{total}}$$

Dimana:

LQ_{ij}	= Nilai LQ kegiatan j di wilayah i
X_{ij}	= Volume kegiatan j di daerah i
X_i	= Volume seluruh kegiatan di daerah i
X_j	= Volume kegiatan j di seluruh daerah
X_{total}	= Volume seluruh kegiatan di seluruh daerah

Adapun interpretasi hasil perhitungan nilai LQ untuk penelitian ini adalah:

- $LQ > 1$: kondisi item kegiatan cenderung terkonsentrasi di daerah kajian dibandingkan dengan kondisi kegiatan sejenis di wilayah lain.
- $LQ = 1$: kondisi kegiatan di wilayah kajian relatif sama (setara) dengan kondisi kegiatan sejenis di daerah lain.
- $LQ < 1$: kondisi kegiatan di daerah kajian relatif lebih kecil dibandingkan dengan kondisi kegiatan sejenis di daerah lain.

➤ Pengukuran nilai *Localization Index (LI)*

Pengukuran LI dilakukan untuk mendukung analisis LQ dimana dari pengukuran LI akan dapat diketahui bagaimana sebaran perkembangan suatu kegiatan, apakah perkembangannya tersebar merata di seluruh bagian daerah atau hanya pada daerah-daerah tertentu. Dengan kata lain, LI dapat digunakan untuk menganalisis daerah mana yang potensial untuk pengembangan suatu kegiatan, sesuai kecenderungan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan yang bersangkutan. Isard (1976) menjelaskan bahwa LI merupakan suatu index yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktivitas dibandingkan dengan kecenderungan aktivitas total di seluruh wilayah. Formula matematis untuk menghitung LI adalah:

$$LI_j = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left\{ \left| \frac{X_{ij}}{X_j} - \frac{X_i}{X_{total}} \right| \right\}$$

Adapun interpretasi terhadap hasil perhitungan nilai LI adalah:

- LI mendekati 1, artinya perkembangan kegiatan cenderung memusat di suatu lokasi sehingga kegiatan yang bersangkutan akan dapat berkembang secara lebih baik jika dilakukan di lokasi tertentu.
- LI mendekati 0, artinya kegiatan yang diamati cenderung memiliki tingkat perkembangan yang sama di suatu daerah, sehingga kegiatan ini dapat dikembangkan sama baik di seluruh bagian daerah.

➤ Pengukuran nilai *Specialization Index (SI)*

Seperti halnya dengan LI, maka pengukuran SI merupakan turunan dari pengukuran LQ. Perhitungan nilai SI digunakan untuk mengidentifikasi kekhasan perkembangan suatu kegiatan di setiap daerah. Adapun formula matematis untuk menghitung SI adalah:

$$SI_i = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m \left\{ \left| \frac{X_{ij}}{X_i} - \frac{X_j}{X_{total}} \right| \right\}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, selanjutnya akan diinterpretasikan sebagai berikut:

- SI mendekati 1, berarti ada kekhasan. Artinya daerah yang diamati memiliki kegiatan tertentu yang relatif menonjol perkembangannya dibandingkan dengan di daerah lain.
- SI mendekati 0, berarti tidak ada kekhasan. Artinya daerah yang diamati tidak memiliki kegiatan tertentu yang relatif menonjol perkembangannya dibandingkan dengan di daerah lainnya.

➤ Analisis dalam rangka identifikasi kondisi kerjasama antar daerah yang telah terbentuk

Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama dan koordinasi antar daerah yang pernah dan sedang dilakukan oleh daerah penelitian dengan daerah lainnya, yang mencakup kajian mengenai lingkup kerjasama, bentuk kerjasama, pihak yang terlibat dan peranannya, tahun mulai dan berlangsungnya kerjasama, manfaat yang diperoleh serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

Pendekatan analisis lain yang digunakan adalah analisis *shift share*. Teknik analisis *Shift share* digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik, tingkat perkembangan dan pertumbuhan aktivitas di suatu daerah dan antar daerah dalam

suatu kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, aktivitas kegiatan yang dianalisis adalah struktur perekonomian sektoral dalam *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) wilayah untuk kurun waktu tahun 2008-2012 (dalam lima tahun terakhir). Dalam hal ini dilakukan kajian tentang kondisi pertumbuhan sektoral di tingkat kabupaten yang menjadi daerah studi dengan di tingkat Propinsi Sulawesi Barat. Dari hasil analisis ini akan dapat diketahui perkembangan suatu sektor di suatu daerah apabila dibandingkan dengan perkembangan sektor sejenis maupun sektor lainnya di daerah lain maupun di keseluruhan wilayah, apakah cenderung pesat ataukah lebih lambat.

Asumsi dalam penelitian ini adalah perubahan produksi/tenaga kerja/nilai produksi di suatu daerah antara tahun dasar dengan tahun analisis dibagi menjadi tiga komponen, yaitu komponen pertumbuhan nasional (*national growth component* / PN) atau *total share*, komponen pertumbuhan proporsional (*proportional mix growth component* / PP) atau *proportional shift / mix*, serta komponen pertumbuhan pangsa wilayah atau daerah (*regional share growth componen* / PPW) atau komponen kompetitif.

1. Komponen pertumbuhan nasional (PN), adalah perubahan kesempatan kerja atau produksi atau nilai produksi di suatu daerah yang disebabkan oleh perubahan kesempatan kerja atau produksi atau investasi, perubahan kebijakan, dan hal-hal lainnya yang dapat memengaruhi kinerja perekonomian di tingkat nasional (seluruh wilayah/daerah).
2. Komponen pertumbuhan proporsional (PP), adalah perkembangan suatu sektor yang muncul karena pengaruh adanya perbedaan permintaan produk akhir, perbedaan ketersediaan bahan mentah, perbedaan kebijakan ekonomi, atau perbedaan struktur pasar yang dimiliki suatu daerah dimana faktor-faktor tersebut mampu mempengaruhi perkembangan ekonomi di suatu daerah. Jika suatu daerah memiliki nilai $PP > 0$ (positif) maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan sektor terkait di daerah analisis cenderung berkembang cepat/pesat. Kondisi sebaliknya berlaku jika nilai $PP < 0$, yang berarti perkembangan sektor tersebut cenderung lambat.

3. Komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW), yaitu perkembangan suatu sektor yang timbul karena pengaruh peningkatan atau penurunan pendapatan, produksi, kesempatan kerja, ketersediaan prasarana dan sarana, dukungan kelembagaan, dan faktor-faktor lainnya yang secara khas dimiliki suatu wilayah. Jika suatu wilayah memiliki nilai $PPW > 0$ (positif) maka dapat disimpulkan bahwa wilayah tersebut memiliki daya saing yang baik atau wilayah memiliki keunggulan daya saing yang baik untuk sektor yang dianalisis. Sebaliknya jika $PPW < 0$, maka berarti wilayah kurang atau bahkan tidak memiliki keunggulan / daya saing pada sektor yang dianalisis.
4. Penjumlahan dari komponen pertumbuhan proporsional dan pangsa wilayah ($PP + PPW$) membuahkan indikator pergeseran bersih (PB), dimana jika nilai $PB > 0$, maka pertumbuhan suatu sektor di wilayah analisis cenderung progresif (maju) dan jika $PB < 0$ maka pertumbuhan suatu sektor di wilayah analisis cenderung lamban. Formula Perhitungan:

$$R_a = \frac{Y_{\bullet j}^t}{Y_{\bullet j}^o} \quad R_i = \frac{Y_{i\bullet}^t}{Y_{i\bullet}^o} \quad r_{ij} = \frac{Y_{ij}^t}{Y_{ij}^o}$$

$$PN_{ij} = (R_a - 1) \times Y_{ij}^0$$

$$PP_{ij} = (R_i - R_a) \times Y_{ij}^0$$

$$PPW_{ij} = (r_{ij} - R_i) \times Y_{ij}^0$$

$$PB_{ij} = PP_{ij} + PPW_{ij}$$

PN_{ij}	=	Komponen pertumbuhan nasional sektor i di wilayah j
PP_{ij}	=	Komponen pertumbuhan proporsional sektor i di wilayah j
PPW_{ij}	=	Komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor i di wilayah j
R_a	=	perbandingan total volume seluruh sektor di seluruh wilayah pada tahun t dengan tahun dasar
R_i	=	perbandingan total volume sektor i di seluruh wilayah pada tahun t dengan tahun dasar
r_{ij}	=	perbandingan volume sektor i di wilayah j pada tahun t dengan tahun dasar
Y_{ij}	=	volume sektor i di wilayah j
$Y_{i\bullet}$	=	volume sektor i di seluruh wilayah
$Y_{\bullet j}$	=	volume seluruh sektor di seluruh wilayah
t	=	tahun t / tahun analisis
o	=	tahun dasar

No	Uraian Kegiatan	Tahun I	Tahun II	Tahun III
----	-----------------	---------	----------	-----------

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

Referensi 5 Tahun Terakhir:

- Burhan. 2011. Kebijakan Pemekaran Daerah Kaubaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana UNM.
- Dwiyanto, Agus (ed), 2006a, *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik, cet-kedua (revisi)*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Gil-Garcia, J. Ramon. 2012. "Towards a smart State? Inter-agency collaboration, information integration, and beyond", *Information Polity* 17 (2012) 269–280 269. DOI 10.3233/IP-2012-000287 IOS Press.
- Gress, Douglas R. 2011. "Cooperative research in international studies: Insights from economic geography", *The Social Science Journal* 48 (2011) 94–111.
- Happaerts, Sander, Simon Schunz, and Hans Bruyninckx. 2012. "Federalism and Intergovernmental Relations: The Multi-Level Politics of Climate Change Policy in Belgium", *Journal of Contemporary European Studies*, Vol. 20, No. 4, 441–458, December 2012.
- Krabina, Bernhard. 2010. "A Semantic Wiki on Cooperation in Public Administration in Europe", *Systemic, Cybernetics and Information*, Volume 8 Number 3, year 2010.
- Peter. 2012. Pemekaran Wilayah: Kebutuhan atau Keinginan.
<http://birokrasi.kompasiana.com/2012/10/24/pemekaran-wilayah-kebutuhan-atau-keinginan-503801.html> diakses 26 Februari 2013 pukul 07:14.
- Ratnawati, Tri. 2009. Pemekaran Daerah "*Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*". Jakarta: Pustaka Pelajar. Akib, 2009
- Ruiz-Tagle, Javier. 2013. "A Theory of Socio-spatial Integration: Problems, Policies and Concepts from a US Perspective", *International Journal of Urban and Regional Research*, Volume 37.2 March 2013 388–408.

Bacaan Tambahan

- Akib, Haedar, dkk. 2006. *Pemetaan Kompetensi Lokal Dalam Rangka Optimalisasi Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah*, UNDP dan Direktorat Otonomi Daerah Bappenas, Jakarta.
- Akib, Haedar, dkk., "Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbasis Kompetensi Ekonomi Lokal, Reviu Hasil Penelitian", *Jurnal BISNIS dan Usahawahan*, Vol 5 No 2, Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNDANA Kupang, Januari 2007.
- Coon, James A. "*Intergovernmental Cooperation*". James A Coon Local Governmental Technical Series. www.dos.state.ny.us, diakses.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.

- Goggin, Malcolm L *et al.* 1990. *Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation*, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Grindle, Merilee S. and John W. Thomas. 1991. *Public Choises and Policy Change, the Political Economy of Reform in Developing Countries*, the Johns Hopkins University Press.
- Harvey, Lynn. "Making Joint Publik Services Work in the 21st Century, Intergovernmental Cooperation: A Background Paper", Southeast Michigan Council of Governments, Juni 2003.
- Ikhsan, Muhammad. 2001. "Otonomi Daerah dan Perubahan Manajemen Pemda, Jurnal Forum Inovasi", *Capacity Building and Good Governance*, Jakarta, h. 34-43.
- Ikhwannuddin, Moch, 2005. "Kerjasama antar Daerah Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Lokal dan Pelayanan Masyarakat", Makalah Disampaikan pada acara Program Penataan Daerah, Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Ham Republik Indonesia, Jakarta.
- Keban, Yeremias T "Kerjasama antar Pemerintah Daerah: Isu, Strategi, Bentuk dan Prinsip, *Perencanaan Pembangunan*, Edisi 02 Thn X Januari-Maret 2005, h. 34-43.
- Kusbiantoro, BS. "Konsep Perencanaan Transportasi Jabodetabekjur". Makalah yang disampaikan pada acara Lokakarya dengan topik: *Sinergi Penataan Ruang dan Revitalisasi Kerjasama Antardaerah di wilayah Jabodetabekjur*, Maret 2006.
- Mardiasmo, *Format Kerjasama Keuangan Daerah Dalam Wilayah Jabodetabejur*, makalah disampaikan pada acara Lokakarya dengan topik "Sinergi Penataan Ruang dan Revitalisasi Kerjasama Antardaerah di wilayah Jabodetabekjur", Jakarta, 27 Maret 2006.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Muljarjadi, Bagdja. 2006. *Metode dan Teknik Dalam Model Kerjasama antar Daerah*, FGD Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program di Bidang Pengembangan Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Bappenas, Bandung, 19 Mei 2006.
- Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*, St. Martin Press, New York.
- Osborne, D dan Gaebler T. 1992. *Reinventing Government: How The Entrepreunial Spirit is Transforming the Publik Sector*, A William Patrick Book New York.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Robbins, Stephen *et al.* 1994. *Organizational Beharviour: Concepts, Controversies and Applications*, Prentice-Hall Australia and New Zealand.
- Rondinelli, Dennis A, Cheema G. Sabbir. 1983. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publications Inc.

- Rudiyanto, Arifin, "Urgensi Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah Dalam Mendukung TUPOKSI Bappenas di Era Otoda", *Perencanaan Pembangunan*, Edisi 02 Tahun IX Maret 2004, h. 15-26.
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta Bandung.
- Taylor, Gary D. 2003. *Intergovernmental Cooperation in the 21st Century*, Michigan State University, Extension Specialist, State & Local Government.
- Tim Peneliti FISIP UI, Pelaksanaan OTDA Mendukung Good Governance, *Jurnal Forum Inovasi*, Vol. 1 November 2001.
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wisconsin Department of Administration, "*Intergovernmental Cooperation: A Guide to Preparing the Intergovernmental Cooperation Element of a Local Comprehensive Plan*", Juni 2002. www.doa.state.wi.us/olis, diakses.

Laporan Penelitian:

- Bappenas, 2005. *Kajian Pengembangan Pola Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah*, Kementerian Negara PPN/Bappenas Jakarta.
- Bappenas, 2005. *Pengembangan Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah: Persoalan dan Peluangnya*, Deputy Bidang Otonomi Daerah Pengembangan Regional Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah.
- Bappenas, *Kajian Revitalisasi Desentralisasi & Otoda: Penyusunan Bentuk-Bentuk Kerjasama Pemerintahan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Dasar*, Makalah Disampaikan dalam acara Focus Group Discussion Kerjasama antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, 12 September 2006.
- Bappenas, *Prospek Kebijakan Kerjasama Antara Daerah & Supporting Logic Project*, Makalah disampaikan Dalam Acara Workshop Kerjasama Antar Kota Tahap II Makassar, 11 September 2006.
- Bappenas. 2006. "*Indikator Good Publik Governance*". Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik, Bappenas.
- Departemen Dalam Negeri, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1730/SJ tanggal 13 Juli 2005.
- Tim Peneliti Bappenas. 2004. *Evaluasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru: Kajian Kelembagaan, Sumberdaya Aparatur, dan Keuangan di untuk Optimalisasi Pelayanan Masyarakat*, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah Bappenas, Jakarta.
- Tim Peneliti Independen UNM. 2009. *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Sulawesi Barat*, Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas, Jakarta.
- Tim Peneliti Independen UNM. 2010. *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Sulawesi Barat*, Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas, Jakarta.

- Tim Peneliti Independen UNM. 2011. *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Sulawesi Barat*, Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas, Jakarta.
- Tim Peneliti Independen UNM. 2012. *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Sulawesi Barat*, Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas, Jakarta.
- Tim Peneliti Independen UNM. 2013. *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Sulawesi Barat*, Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas, Jakarta.
- Tim Peneliti KPPOD. 2005. *Daya Tarik Investasi Kabupaten atau Kota di Indonesia: Persepsi Dunia Usaha*, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah bekerjasama dengan the Asia Foundation, Jakarta.
- Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Revisi Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

Komponen Pengeluaran	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Total
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A. Gaji dan Upah	30.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000
1. Tim Peneliti	17.000.000	17.000.000	17.000.000	51.000.000
2. Upah Tim enumerator	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
3. Upah Tim Pengumpul Data	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
B. Bahan Perangkat / Penunjang	30.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000
1. Komputer	7.000.000	7.000.000	7.000.000	21.000.000
2. Printer Epson	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
3. Kamera Digital	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000
4. Tinta Printer	800.000	800.000	800.000	2.400.000
5. LCD	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000
6. Alat Perekam	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
7. Pulpen	200.000	200.000	200.000	600.000
8. Kursi + Meja Pertemuan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	24.000.000
9. Hardisk Eksternal	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
C. Perjalanan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	75.000.000
1. Mengurus Izin Penelitian	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000
2. FGD	6.000.000	6.000.000	6.000.000	18.000.000

3. Kumpul Data	15.000.000	15.000.000	15.000.000	45.000.000
Lain-Lain	15.000.000	15.000.000	15.000.000	45.000.000
a. Administrasi	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
b. Publikasi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
c. Lokakarya/Seminar	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
d. Pengolahan dan analisis data	2.500.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000
e. Penggandaan laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
f. Dokumentasi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
g. Insentif Responden	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
TOTAL	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Penelitian

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

Komponen Pengeluaran	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Total (Rp)
A. Gaji dan Upah	30.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000
1. Tim Peneliti	17.000.000	17.000.000	17.000.000	51.000.000
2. Upah Tim enumerator	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
3. Upah Tim Pengumpul Data	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
B. Bahan Perangkat / Penunjang	30.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000
1. Komputer	7.000.000	7.000.000	7.000.000	21.000.000
2. Printer Epson	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
3. Kamera Digital	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000
4. Tinta Printer	800.000	800.000	800.000	2.400.000
5. LCD	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000
6. Alat Perekam	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
7. Pulpen	200.000	200.000	200.000	600.000
8. Kursi + Meja Pertemuan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	24.000.000
9. Hardisk Eksternal	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
C. Perjalanan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	75.000.000
1. Mengurus Izin Penelitian	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000
2. FGD	6.000.000	6.000.000	6.000.000	18.000.000
3. Kumpul Data	15.000.000	15.000.000	15.000.000	45.000.000
Lain-Lain	15.000.000	15.000.000	15.000.000	45.000.000
a. Administrasi	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
b. Publikasi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
c. Lokakarya/Seminar	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
d. Pengolahan dan analisis data	2.500.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000
e. Penggandaan laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
f. Dokumentasi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
g. Insentif Responden	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
TOTAL	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000

Lampiran 2 Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

SUSUNAN ORGANISASI TIM PELAKSANA

No.	N a m a NIDN	Institusi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu, (Jam/Minggu)	Uraian Tugas
1.	Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si. NIDN 0022056506	Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FIS UNM	Ilmu Administrasi	Ketua Pelaksana 10 jam/minggu	1. Merumuskan judul 2. Membimbing penyusunan proposal dan instrumen 3. Koordinasi instansi terkait (obyek penelitian) 4. Mengkoordinir pelaksanaan penelitian
2.	Dr. Risma Niswaty, M.Si. NIDN 0026027206	Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FIS UNM	Ilmu Administrasi Publik	Anggota 8 jam/minggu	1. Menyiapkan proposal 2. Menyiapkan instrumen 3. Mengumpulkan data
3.	Ismail, S.Pd., M.Si. NIDN 0009097907	Program Studi Administrasi Negara FIS UNM	Ilmu Administrasi Publik	Anggota 8 jam/minggu	1. Mengolah dan menganalisis data 2. Menyusun laporan tahunan dan artikel 3. Mengurus Administrasi Seminar hasil dan dokumentasi

[illegible]

Lampiran 4 Biodata Ketua dan Anggota Peneliti

KETUA TIM PENELITIAN

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si.
2	Jabatan Fungsional	Guru Besar
3	Jabatan Struktural	Ketua Program Studi S3 Ilmu Administrasi Publik PPs UNM
4	NIP/NIK/No. Identitas Lainnya	19650522 199003 1 002
5	NIDN	0022056506
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pangkep, 22 Mei 1965
7	Alamat Rumah	Jalan Sunu Kompleks UNHAS Baraya Blok A.12 Makassar
8	Nomor Telepon/Fax.	0411-456879
9	Nomor HP.	08128023594
10	Alamat Kantor	Gedung BH Kampus FIS UNM, Gunungsari Baru, 90222
11	Nomor Telepon/Fax.	0411-889464 / 0411-887406
12	Alamat e-mail	haedar652002@yahoo.com.au
13	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= orang; S-2= orang; S-3= orang
14	Mata Kuliah yang Diampu	1. Analisis Kebijakan Publik (S1) 2. Konsep & Teori Ilmu Administrasi (S2, S3) 3. Administrasi & Kebijakan Publik (S2, S3) 4. Sistem Informasi Manajemen (S2) 5. Sistem Pengambilan Keputusan Strategik (S1) 6. Evaluasi Kinerja Lembaga Diklat (S2) 7. Administrasi Pembangunan (S1, S3) 8. Manajemen Kebijakan Strategis (S2)

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama PT.	IKIP Ujung Pandang	Universitas Indonesia Jakarta	Universitas Indonesia Jakarta
Bidang Ilmu	Pend. Administrasi Perkantoran	Ilmu Administrasi Niaga	Ilmu Administrasi Niaga

	S1	S2	S3
Tahun Masuk-Lulus	1983/1988	1994/1997	2000/2005
Judul Skripsi/ Tesis/Disertai	Pengaruh Motivasi terhadap Perilaku Pegawai pada Kantor P dan K Kabupaten Pangkep	Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Distribusi Pupuk di Indonesia	Kreativitas Dalam Organisasi: Pengaruh Struktur, Budaya dan Iklim Organisasi terhadap Perilaku Kreatif Pegawai Bosowa Group
Nama Pembimbing/ Promotor	Drs. Hanafie Mahtika, MS. Drs. Maharuddin Pangewa, M.Si.	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D.	Prof. Dr. M. Syamsul Ma'arif (Promotor), Surya Dharma, MPA, Ph.D, Dr. Ferdinand D. Saragih, MA.

C. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
2	2008	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Deputi Bidang EKPD Bappenas	125.000.000
4	2006	Analisis Sistem Dinamis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan,	UNDP dan Direktorat Otonomi Daerah Bappenas Jakarta	100.000.000
5	2009	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Deputi Bidang EKPD Bappenas	100.000.000
6	2009	Kerjasama dan Koodinasi Antar Daerah Dalam Penyediaan Layanan Publik Dasar di Kawasan Ajatappareng Sulawesi Selatan	DP2M Dikti Depdiknas, Jakarta	99.200.000
7	2010	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Deputi Bidang EKPD Bappenas	126.150.000
8.	2010	Pengembangan Model Institusi Pelayanan Pendidikan di	Dikti DP2M	75.000.000

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
		Kawasan Ajatappareng Sulawesi Selatan		
9.	2011	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Deputi Bidang EKPD Bappenas	126.150.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2007	Pembimbing dan Koordinator Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) bagi 15 Pengawas SMA/SMK	Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas	42.500.000
2	2008	Pembimbing dan Koordinator Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) bagi Pengawas SMA/SMK	Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas	117.500.000
3	2007	Nara Sumber/Fasilitator pada rangkaian kegiatan Bimbingan Teknik Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah di Indonesia	Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas	-
4	2008	Nara Sumber/Fasilitator pada Bimbingan Teknik Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah di Indonesia	Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas	-
5	2008	Nara Sumber/Fasilitator Kegiatan Pendidikan & Pelatihan Calon Kepala Sekolah SMP pola 72 Jam,	LPMP Provinsi Lampung	-
6.	2009	Konsultan World Bank untuk Program BERMUTU, lokasi tugas di LPMP Provinsi Sulawesi Selatan, Oktober-Desember	World Bank	66.000.000
7.	2009	Fasilitator Program	Direktorat	-

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
		“Akuntabilitas Kepala Sekolah” di Indonesia.	Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK Depdiknas	
8	2009	<i>Provincial Core Team (PCT)</i> Bidang Studi IPS Program BERMUTU	World Bank dan LPMP Sulawesi Selatan	-
9	2009	Fasilitator pada Program “Penguatan Kapasitas DPRD”	Kerjasama LAN dan USAID-DRSP Makassar	-
10	2009	Narasumber pada Seminar Akhir EKPD Bappenas Jakarta	Direktorat EKPD Bappenas, Jakarta	-
11	2011	Tim Leader Konsultan Bermutu Wilayah Timur Indonesia	Kerjasama Kemendiknas dengan PT. Multidecon Internal, Jakarta	-

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor	Nama Jurnal
1	2007	Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbasis Kompetensi Ekonomi Lokal, Reviu Hasil Penelitian,	Vol. 5 No 2, Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNDANA Kupang, Januari	Jurnal Bisnis & Manajemen FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang
2	2008	Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya	tahun 1 no. 1 Vol. 1, Juli-September 2008	Jurnal Baca, Universitas Pepabri Makassar
3	2006	Determinan Kreativitas Dalam Domain Pembuatan Keputusan Manajerial, Review Hasil Penelitian	Vol. 5 No. 1	Jurnal Bisnis & Usahawan, FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang
4	2006	Memahami Konflik	Vol. 5 No. 1	Jurnal Bisnis &

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor	Nama Jurnal
		sebagai Fenomena Organisasi Sepanjang Masa		Usahawan, FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang
5	2006	Menapaki Jalan Yang Dilalui Komunitas Praktis	Volume VII/Nomor 1/April 2006, ISSN 1412-3584	Jurnal VISI Ilmu Administrasi FISIP UNHAS,
6	2006	Mencermati Kapabilitas Organisasi Berbasis Pengetahuan	Volume VII/Nomor 2/September 2006, ISSN 1412-3584	Jurnal VISI Ilmu Administrasi FISIP UNHAS
7	2007	Potret Efektivitas Organisasi Publik	Januari/I	Manajemen USAHAWAN Indonesia, FE-UI, Akreditasi Dikti Nomor: 23a/Dikti/Kep/2004
8	2008	Reaktualisasi Fungsi dan Peranan Kepala Sekolah	Vol. 3 No. 2 Agustus 2008, h. 55-66	Jurnal Tenaga Kependidikan, Direktorat Tendik Diknas
9	2008	Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya	Edisi tahun 1 no. 1 Vol. 1, Juli-September 2008, hal. 28-40.	<i>Jurnal Baca</i> , Universitas Pepabri Makassar
10	2009	<i>Quality Function Deployment (QFD)</i> sebagai Alat Mutu	No. 01 TH. XXXVIII 2009	Manajemen Usahawan Indonesia, FE UI
11	2009	Artikulasi Perkembangan Administrasi Publik	Edisi Maret-Mei 2009	Jurnal Baca, Universitas Pepabri Makassar
12	2009	Artikulasi Peran Aristoteles Dalam Membentuk Wajah Sains Modern	Edisi: Vol. 1 No. 1, Januari-Maret 2009	Jurnal Baca, Universitas Pepabri Makassar
13	2009	Kewirausahaan Sekolah Berbasis Kreativitas dan Inovasi	Agustus 2009 Vol. 15. Edisi Khusus I, Akreditasi LIPI:	Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Litbang

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor	Nama Jurnal
			100/Akred-LIPI/P2MBI/10/2007	Depdiknas, Jakarta.
14	2009	Mencermati Kreativitas Pekerja sebagai Aset Organisasi	Volume 1 N0. 2 Juli 2009, ISSN: 1979-8946	Jurnal Bisnis & Manajemen, Jurusan Administrasi Bisnis FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang
15	2009	<i>Snapshot</i> Dampak Kebijakan Publik Dalam Program Pengentasan Kemiskinan	Nomor 05 TH. XXXVIII 2009. Nomor ISSN: 0302-9859	Majalah Manajemen USAHAWAN Indonesia, FE-UI Jakarta.
	2010	Implementasi kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana	Vol. 1 No. 1, 2010	Program Studi Administrasi Publik PPs S3 UNM Makassar.
	2011	Mencermati Heuristik Transformasi organisasi: Merektualisasi Perilaku Kreatif Manusia Melalui Pendekatan <i>Knowledge Management</i> .		Jurnal Manajemen USAHAWAN Indonesia FE-UI Jakarta.
	2013	“Independence of Election Commission of Regional Head of Regional Election in Indonesia”	Issue: October-2013: Volume: 3 Number: 06 ISSN:2251-1571	<i>The International Journal's Research Journal of social science a Managemnt</i>
	2013	“Policy Impact of Regional Development Based on Local Potencial Toward The Economic Structure Of Regency Bantaeng”	Januari, 2014 (Vol. 6, No.1) ISSN:2075-4124	<i>International Journal of Academic Research</i>
	2013	“The analysis of public policy formulation at legislative board of South	March 30, 2014 (Vol. 6, No. 2) ISSN:2075-7107	<i>Journal of Academic Research</i>

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor	Nama Jurnal
		Sulawesi province”		<i>International</i>

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah

No.	Nama Pertemuan Ilmiah	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Seminar Akhir	Laporan Akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	November 2009, Jakarta
2.	Seminar Akhir	Laporan Akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	November 2010, Jakarta
3.	Seminar Akhir	Laporan Akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	13-15 November 2011, Jakarta

G. Pengalaman Penulisan Buku

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2008	Kewirausahaan Sekolah, Bahan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	125	Kerjasama AusAID dan Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas, Jakarta
2	2008	Manajemen Perubahan Sekolah Menuju Sekolah Efektif, Bahan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	125	Kerjasama AusAID dan Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas, Jakarta

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
3	2009	Dasar-dasar Teori Organisasi	180	Lembaga Penerbitan Universitas Negeri Makassar
4	2008	Modul Instruktur: Pendalaman Materi Administrasi Perkantoran	150	Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 UNM

H. Pengalaman Perolehan HKI

No.	Tahun	Judul/Tema HKI	Jenis	Nomor Pendaftaran/ Sertifikat
1	2007	Dasar-dasar Teori Organisasi	ISBN	978-979-26-4890-4

I. Pengalaman Rumusan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya

No.	Tahun	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah diterapkan	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	2007	Penempatan dan Sosialisasi Dimensi Kewirausahaan dalam Kompetensi Kepala Sekolah (Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kewirausahaan	Depdiknas	Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah sangat antusias mengikuti Bimbingan Teknis
2	2008	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Bappenas	Provinsi Sulawesi Barat	Ketekunan dan Semangat SKPD (satuan kerja pembangunan daerah) mengikuti FGD dan Melaporkan Capaian Kinerja Instansinya

No.	Tahun	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah diterapkan	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
3	2006	Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan APBD di Kabupaten Sumedang (Best Practice)	Kabupaten Sumedang	Konsistensi <i>Policy Stakeholders</i> dalam memberikan kritik dan saran guna peningkatan mutu partisipasi masyarakat
4	2009	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Bappenas	Provinsi Sulawesi Barat	Ketekunan dan Semangat SKPD (satuan kerja pembangunan daerah) mengikuti FGD dan Melaporkan Capaian Kinerja Instansinya
5	2010	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Bappenas	Provinsi Sulawesi Barat	Ketekunan dan Semangat SKPD (satuan kerja pembangunan daerah) mengikuti FGD dan Melaporkan Capaian Kinerja Instansinya
6	2011	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Bappenas	Provinsi Sulawesi Barat	Ketekunan dan Semangat SKPD (satuan kerja pembangunan daerah) mengikuti FGD dan Melaporkan Capaian Kinerja Instansinya
7.	2012	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Bappenas	Provinsi Sulawesi Barat	Ketekunan dan Semangat SKPD (satuan kerja pembangunan daerah) mengikuti

No.	Tahun	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah diterapkan	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
				FGD dan Melaporkan Capaian Kinerja Instansinya
8.	2010	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Bappenas	Provinsi Sulawesi Barat	Ketekunan dan Semangat SKPD (satuan kerja pembangunan daerah) mengikuti FGD dan Melaporkan Capaian Kinerja Instansinya
9.	2011	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Bappenas	Provinsi Sulawesi Barat	Ketekunan dan Semangat SKPD (satuan kerja pembangunan daerah) mengikuti FGD dan Melaporkan Capaian Kinerja Instansinya
10.	2012	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Bappenas	Provinsi Sulawesi Barat	Ketekunan dan Semangat SKPD (satuan kerja pembangunan daerah) mengikuti FGD dan Melaporkan Capaian Kinerja Instansinya
11.	2013	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Bappenas	Provinsi Sulawesi Barat	Ketekunan dan Semangat SKPD (satuan kerja pembangunan daerah) mengikuti FGD dan Melaporkan Capaian Kinerja

No.	Tahun	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah diterapkan	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
				Instansinya
12.	2013	Pelayanan Publik Dasar (Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi) dalam Perspektif Gender Di Kota Makassar	Bappeda Kota Makassar	
	2013	Analisis Kunjungan Wisatawan di Kota Makassar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar	
	2013	Analisis Hotel dan Kamar Hotel di Kota Makassar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar	
	2013	analisis Daya Tarik Wisata (DTW) berbasis Kunjungan Wisatawan di Kota Makassar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resiko.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan Penelitian Strategis Nasional.

Makassar, 26 April 2015

Pengusul



(Prof. Dr. H. Haedar Akib, M.Si.)

ANGGOTA PENELITI I

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Risma Niswaty, S.S., M.Si.
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Jabatan Struktural	Skeretaris Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran FIS UNM
4	NIP/NIK/No. Identitas Lainnya	19720126 200312 2 004
5	NIDN	0026017206
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Ujung Pandang, 26 Januari 1972
7	Alamat Rumah	Taman Pesona Asri Blok C No.4 Sungguminasa
8	Nomor Telepon/Fax.	0411-8215742
9	Nomor HP.	081343972223
10	Alamat Kantor	Gedung BE Kampus FIS UNM, Gunungsari Baru, 90222
11	Nomor Telepon/Fax.	0411-889464 / 0411-887406
12	Alamat e-mail	risma.niswaty@gmail.com
13	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= orang; S-2= orang; S-3= orang
14	Mata Kuliah yang Diampu	1. Analisis Kebijakan Publik (S1) 2. Manajemen Sumber Daya Manusia (S1) 3. Sistem Informasi Manajemen (S1) 4. Teknologi Informasi dan Komunikasi (S1) 5. Metodologi Penelitian Sosial (S1) 6. Teori dan Etika Komunikasi (S1) 7. Manajemen Usaha Kecil (S1) 8. Publik Relation dan Keprotokolan (S1)

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama PT.	Universitas Hasanuddin	Universitas Hasanuddin	Universitas Negeri Makassar
Bidang Ilmu	Sastra Inggris	Ilmu Komunikasi	Ilmu Administrasi Publik
Tahun Masuk-Lulus	1991/1996	1997/2000	2008/2013
Judul Skripsi/	Mary Shelley's	Analisis Semiotika	Demokratisasi dan

	S1	S2	S3
Tesis/Disertai	Frankenstein: Analisis Sosiologis Struktural	terhadap Tanda dan Ideologi dalam Iklan Anak-anak di Televisi	Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gowa oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
Nama Pembimbing/ Promotor	Drs. Ishak Ngeljaratan, MS./ Drs. M.Amir, M.Si.	Dr.S. Sinansari ecip/ Dr.Mansyur Semma, M.Si.	Prof.Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D. (Promotor); Prof. Dr. H.Andi Makkulau (Kopromotor); Prof.Dr.Haedar Akib, M.Si. (Kopromotor)

C. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2003-2005	Representasi Bahasa sebagai Sistem Makna Sosial, Historis, dan Politik (Riset Pengembangan dan Implementasi Teori Linguistik Gramscian)	RUKK Kemenristek	150.000.000
2	2006	Pemberdayaan Industri Kecil Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare	SPP/DPP	1.500.000
3	2006	Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Bacukiki Kecamatan Pare-Pare	DP2M	1.500.000

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
4	2012	Implementasi Kebijakan Pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)	PNBP	3.500.000
5	2013	Demokratisasi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gowa oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah	Hibah Doktor	31.500.000
6	2013	Efektivitas Pelaksanaan Tugas Sekretaris pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan	PNBP	5.000.000
7	2014	Manajemen Keluhan Pelanggan (<i>Complaint Management</i>) pada Pemberian Layanan Publik di Kota Makassar	PNBP	7.500.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2006	Pelatihan Penyusunan Proposal Peneliti Bagi Guru-Guru SMP Batara Gowa Di Kabupaten Gowa	DP2M	2.000.000
2	2010	Pelatihan Pengelolaan Arsip pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa	PNBP	4.000.000
3	2011	Pelatihan dan Pendampingan Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Lembaga Mitra Lingkungan (LML) Sulawesi Selatan	PNBP	4.000.000
4	2012	Pendampingan Penerapan Prinsip Pelayanan Publik pada Puskesmas Tamalate Makassar	PNBP	4.000.000

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
5	2012-2013	Pendampingan Masyarakat Lingkar I PT Semen Tonasa dalam Pengelolaan Dana CSR	PT Semen Tonasa	85.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor	Nama Jurnal
1	2010	Pengelolaan Arsip Dinamis pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa”	Volume XII Nomor 24 Juli 2010.	Dedikasi
2	2011	Sistem Informasi Manajemen yang Berbasis Komputer pada Pengolahan Data dan Informasi di Lembaga Mitra Lingkungan Sulawesi Selatan	Volume XIII/Nomor 2/ Juli 2011	Dedikasi
3	2012	Independensi Penyelenggara Pemilu pada Pemilukada (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Gowa)	Volume 8/Nomor 2/ September 2012	Ekonomi dan Manajemen
4	2014	Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia: (Eksplorasi Konstruksi Model Normatif Prosedur Demokrasi)	Volume I Nomor 1 Desember 2014.	Ad’ministrare Universitas Negeri Makassar

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah

No.	Nama Pertemuan Ilmiah	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional Reformasi Birokrasi Menuju Tata Pemerintahan yang Baik	Reformasi Penyelenggara Pemilu menuju Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pascasarjana Universitas Negeri Makassar
2	Diskusi Tematik Sekolah Demokrasi	Partai Politik dan Pendidikan Politik bagi Masyarakat	Komunitas Indonesi untuk Demokrasi (KID) dan Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR)
3	Seminar Nasional “Membentuk Karakter Unggul Siswa Melalui Sistem Pendidikan Terpadu”	Kebijakan = Kebajikan Pendidikan?	Minggu, 16 Mei 2014 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel
4	Festival Dato Tiro 2015	Kebijakan Lokal Berbasis Kesejarahan	1-2 Februari 2015, Bulukumba

G. Pengalaman Penulisan Buku

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2013	Standard Learning Materials and Assessment for Hospitality	156	Alauddin University Press

H. Pengalaman Perolehan HKI

No.	Tahun	Judul/Tema HKI	Jenis	Nomor Pendaftaran/ Sertifikat
	---	-----	---	-----

I. Pengalaman Rumusan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya

No.	Tahun	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah diterapkan	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
	---	-----	---	-----

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikoanya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan Penelitian Strategis Nasional.

Makassar, 26 April 2015
Pengusul



(Dr. Risma Niswaty, S.S., M.Si.)

ANGGOTA TIM PENELITIAN

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Ismail, S.Pd., M.Si.
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP/NIK/No. Identitas Lainnya	197909092010121004
5	NIDN	0009097907
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pare-Pare, 9 September 1979
7	Alamat Rumah	Jl. A.P. Pettarani III No. 27 Makassar
8	Nomor Telepon/Fax.	0411-8231046
9	Nomor HP.	08114109979
10	Alamat Kantor	Gedung BH Kampus FIS UNM, Gunungsari Baru, 90222
11	Nomor Telepon/Fax.	0411-889464 / 0411-887406
12	Alamat e-mail	Injurytime79@gmail.com
13	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= 14 orang
14	Mata Kuliah yang Diampu	1. Adm. Pemerintahan Daerah
		2. Adm. Pembangunan
		3. Pengambilan Keputusan
		4. Sistem Politik Indonesia
		5. Metode Penelitian Administrasi
		6. Sistem Informasi Manajemen
		7. Teori-teori Pembangunan
		8. Manajemen Strategik Sektor Publik

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama PT.	Universitas Negeri Makassar	Universitas Hasanuddin	-
Bidang Ilmu	Pend. Administrasi Perkantoran	Administrasi Pembangunan	-
Tahun Masuk-Lulus	1997-2003	2006-2008	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertai	Efektivitas Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Terminal Petta Ponggawae	Analisis Kompetensi Pegawai di Sekretariat DPRD Kota Makassar	-

	S1	S2	S3
	Kabupaten Bone		
Nama Pembimbing/ Promotor	1. Drs. Muchtar Yunus, M.Si. 2. Drs. Sahnung, M.Si.	1. Prof. Dr. Mappa Nasrun, MS. 2. Prof. Dr. Sangkala, M.Si.	=

C. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2010	Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Struktural Tenaga Administrasi di Universitas Negeri Makassar	PNBP FIS UNM	3.500.000
2.	2012	Analisis Daya Tampung, Ketersediaan Ruang Belajar, Jumlah Dosen, dan Jumlah Mata Kuliah di Tiap Jurusan/Program Studi dalam Lingkungan Universitas Negeri Makassar	PNBP FIS UNM	5.000.000
3.	2013	Evaluasi Pembelajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Semester Gasal 2012-2013	PNBP FIS UNM	5.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2012	IbM Penulisan Karya Ilmiah Se Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone	PNBP FIS UNM	5.000.000
2	2013	IbM Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru-guru Sekolah	PNBP FIS UNM	5.000.000

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
		Dasar Se Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar		
3	2014	IbM Pendidikan Politik bagi Warga Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	PNBP FIS UNM	7.500.000-

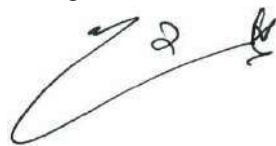
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor	Nama Jurnal
1	2011	Analisis Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar	Volume 6 Nomor 2	Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen LP3AMI Bekerjasama dengan Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FIS UNM Makassar. ISSN. 1829-6629
2	2013	Program Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Tinjauan terhadap Pelaksanaan Program PNPM Mandiri)	Volume 1 Nomor 1, Desember 2013.	Jurnal Birokrat Program Studi Ilmu Administrasi Negara FIS UNM. ISSN. 2354-5925
3	2014	Pengembangan Situs Leang-leang sebagai Objek Wisata dalam Menunjang Pembangunan Daerah Kabupaten Maros	Volume 1 Nomor 1, April 2014.	Jurnal Sosial Budaya Program Studi Pendidikan Antropologi FIS UNM. ISSN. 2339-2312

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resiko.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan Penelitian Strategis Nasional.

Makassar, 26 April 2015
Pengusul

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate mark.

(Ismail, S.Pd., M.Si.)

Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Peneliti/pelaksana



SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof.Dr.Haedar Akib, M.Si.
NIDN : 196505221990031002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya /IV d
Jabatan Fungsional : Guru Besar

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul :

**"Dampak Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Pengembangan Kompetensi Lokal
Sebagai Basis Kerjasama Antar Daerah di Propinsi Sulawesi Barat"**

Yang diusulkan dalam skema Penelitian Strategis Nasional untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain. Bila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikanseluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini, dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui :
Kepala Lembaga Penelitian,

(Prof. Dr. H. Jufrin, M.Pd.)
NIP. 19591231198031016

Makassar, 27 April 2015

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
Rp. 6000
6000
Rp. 6000

Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si.
NIP. 196505221990031002